

## Analisis Media Digital dalam Pembentukan Opini Politik Publik di Indonesia

Rosi Rijal Sani<sup>1</sup>, M. Basuki Rahmat<sup>2</sup>, Purwanto<sup>3</sup>, M.Shodikin<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Anwar Medika

<sup>2</sup>Program Studi S1 Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>3,4</sup>Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Anwar Medika

E-mail: rosi.rijal@uam.ac.id

### Article History:

Received: 01 April 2026

Revised: 14 April 2026

Accepted: 17 April 2026

**Keywords:** *Media Digital, Opini Publik, Komunikasi Politik, Algoritma, Polarisasi Sosial.*

**Abstract:** *Evolusi media digital telah mengubah dinamika komunikasi politik dan pembentukan opini publik di Indonesia. Publik semakin berfungsi lebih dari sekedar konsumen tetapi juga sebagai produsen yang memiliki informasi politik melalui berbagai platform digital. Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh media digital terhadap opini politik publik dan konsekuensinya terhadap proses demokrasi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui penggunaan teknik analisis analisis konten pada data yang bersumber dari portal berita online dan media sosial. Data dikumpulkan pada konten bermuatan politik yang menunjukkan partisipasi tinggi, kemudian dikategorikan ke dalam klasifikasi opini pro, kontra, dan netral. Temuan menunjukkan bahwa pembentukan opini publik dipengaruhi oleh teknik pembingkai informasi, penggunaan bahasa emosional, dan pengaruh algoritma yang menghasilkan efek ruang gema (echo chamber). Tiga pola utama narasi politik dikenali: suportif, kritis, dan informatif, masing-masing menunjukkan ciri komunikatif yang unik. Selain itu, konten visual seperti meme telah menunjukkan efektivitas dalam membentuk persepsi publik. Hal ini menegaskan bahwa media digital memiliki fungsi ganda: memfasilitasi demokratisasi informasi dan memicu polarisasi sosial. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi vital guna memungkinkan publik mengevaluasi informasi secara logis dan menjunjung tinggi integritas demokrasi di era digital.*

### PENDAHULUAN

Hingga kini, demokrasi dimaknai sebagai hubungan timbal balik antara rakyat dan elite melalui lembaga legislatif serta eksekutif, dengan harapan aspirasi publik dapat membentuk kebijakan negara. Meski demikian, sering kali muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemimpin politik akibat merasa suara mereka diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Pola komunikasi politik Indonesia akhirnya berubah secara signifikan dengan adanya

media digital. Media sosial, portal berita *online*, dan *platform digital* lainnya menjadi tempat sarana bagi masyarakat untuk mengakses dan berbicara tentang masalah politik (Munfida, Soetijono, & Indrayati, 2023) . Pengguna internet, juga dikenal sebagai netizen, tampaknya memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka melalui media sosial. Dianggap lebih demokratis dan memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi secara interaktif. Media sosial dapat dikategorikan sebagai ruang publik berdasarkan karakteristiknya (Juditha & Darmawan, 2018).

Demokrasi tidak lepas dari kehadiran masyarakat dalam menciptakan ruang partisipasi masyarakat yang aktif. Partisipasi masyarakat yang aktif tentunya dapat meningkatkan legitimasi pemerintah, memperkuat tuntutan hak asasi manusia, dan mendorong pengambilan keputusan politik yang bertanggung jawab dan transparan. Fitriani, Budiyan, Hardika, & Choerunissa (2023) menjelaskan dalam situasi seperti ini, teknologi dan media sosial telah berkembang menjadi alat yang signifikan yang membantu masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Media sosial tidak ada batasan waktu dan memiliki kemampuan untuk memasuki ranah pribadi setiap penggunanya. Seseorang dapat mendapatkan informasi tentang berbagai topik dari berbagai sumber, bahkan lintas negara. Demikian pula, individu dapat dengan cepat menyebarkan informasi kepada orang lain melalui media sosial, termasuk penggunaannya untuk aktivitas atau kampanye politik (Maulana, 2017).

Media sosial memberdayakan warga negara untuk terlibat sebagai peserta politik aktif dengan memungkinkan mereka untuk mengembangkan dan menyebarkan informasi pilihan mereka. Mereka dapat mengartikulasikan dukungan atau penolakan mereka terhadap kebijakan pemerintah, mendukung atau menentang individu tertentu, dan menyampaikan perspektif politik mereka (Febriansyah & Muksin, 2020) . Semua ini dapat diartikulasikan secara publik tanpa kesulitan demonstrasi fisik; hal ini dapat dilakukan dari lokasi mana pun dengan konektivitas internet menggunakan perangkat elektronik. Meskipun demikian, tidak semua individu dapat memperoleh pengakuan yang luas. Evolusi media sosial telah menempatkannya sebagai instrumen yang memiliki pengaruh krusial terhadap cara pandang masyarakat. Platform-platform seperti Facebook, X (Twitter), Instagram, dan TikTok kini berfungsi sebagai ruang publik digital yang memfasilitasi diseminasi ide, konstruksi wacana, serta dialektika antarwarga (Zhuravskaya, Petrova, & Enikolopov, 2020).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa media digital, khususnya melalui interaksi pengguna dan sistem penyampaian informasi, secara signifikan memengaruhi opini politik publik di Indonesia. Menurut penelitian Lim (2017) , media sosial merupakan instrumen yang berguna untuk mobilisasi politik serta komunikasi, terutama selama pemilihan umum. Menurut studi Jurriëns & Tapsell (2017) , oligarki media digital di Indonesia berdampak pada akses publik terhadap informasi politik, yang dapat menyebabkan terbentuknya opini yang tidak sepenuhnya netral. Selain itu, studi Setyawan (2023) menemukan bahwa tingkat literasi digital suatu masyarakat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menyaring informasi politik, yang pada gilirannya menentukan kualitas opini publik yang terbentuk.

Selanjutnya, studi Al Fatih, Putera, & Umar (2024) menemukan bahwa algoritma media sosial berkontribusi pada terciptanya ruang gema (*echo chamber*), di mana pengguna lebih cenderung menemukan konten yang mendukung keyakinan politik mereka. Hasil penelitian Aidah, Amalia, & Aqida (2026) mendukung hal ini, menunjukkan bahwa paparan rutin terhadap konten di media digital dapat memperkuat keyakinan politik tertentu dan memperburuk polarisasi masyarakat. Selain itu, meskipun ada kemungkinan penyebaran informasi palsu, sebuah studi oleh Achmad & Dwimawanti (2024) menunjukkan bahwa media digital juga menciptakan potensi untuk partisipasi politik yang lebih inklusif, khususnya bagi generasi muda. Temuan-

.....

temuan ini menunjukkan bahwa media digital memiliki peran ganda dalam demokrasi: dapat memberdayakan masyarakat sekaligus menjadi penghalang bagi pembentukan opini publik.

Dalam ranah digital, polarisasi politik tampak jelas di dalam masyarakat, yang termanifestasi melalui perspektif yang semakin terpecah yang diungkapkan di platform media sosial (Fathurochman & Tutiasri, 2023). Hal ini telah mengakibatkan perbedaan pandangan yang signifikan, mendorong tindakan politik dan memecah belah ikatan sosial di dalam komunitas. Publik memiliki peran penting dalam pengaturan politik, salah satu cara keterlibatan publik dalam pelaksanaan otoritas politik adalah melalui artikulasi opini publik. Opini publik dapat dicirikan sebagai suatu proses yang mengkonsolidasikan pemikiran, sentimen, dan gagasan warga negara menjadi usulan mengenai kebijakan pemerintah. Opini-opini ini dapat mencakup konflik, keberatan, dan perselisihan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi (Aridho et al., 2024).

Opini publik merupakan salah satu elemen kebebasan, yang mewujudkan keterbukaan dalam menyuarakan ide, pandangan, atau bahkan kritik. Opini publik dapat dianggap sebagai ekspresi dan reaksi warga negara terhadap berbagai kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Penyampaian opini saat ini dapat dianggap relatif mudah jika dibandingkan dengan era perkembangan demokrasi sepanjang sejarah. Munculnya media digital telah menjadi pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik. Misalnya, media sosial telah menjadi komponen penting dari strategi politik untuk mendapatkan dukungan dari legislator, partai politik, dan lembaga pemerintah. Media digital berfungsi sebagai platform vital untuk menyebarkan informasi dan memainkan peran kunci dalam menyampaikan isu-isu sosial yang muncul. Lebih spesifik lagi, media sosial memiliki kemampuan untuk menyebarkan opini public (Puspianto, 2021).

Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa penelitian sebelumnya, masalah tentang bagaimana media digital memengaruhi opini politik publik di Indonesia adalah dasar penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, rumusan masalah penelitian berpusat pada bagaimana mekanisme pembingkai informasi politik, pola konsumsi media digital, dan peran algoritma platform digital memengaruhi pembentukan opini politik publik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menggabungkan, dan menganalisis tentang bagaimana media digital membentuk opini politik publik dan bagaimana hal itu berdampak pada demokrasi di Indonesia.

### **LANDASAN TEORI**

Transisi demokrasi dari ranah deliberatif ke ranah digital telah mengubah cara warga negara berinteraksi dengan otoritas. Media digital saat ini berfungsi sebagai kerangka kerja utama untuk iterasi kontemporer dari konsep *ruang publik* yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan aspirasi mereka tanpa batasan pemerintah yang ketat. Keterlibatan aktif ini mencakup tidak hanya partisipasi elektoral tetapi juga pengawasan berkelanjutan terhadap kebijakan publik. Prasetyo dan Sumardjo (2020) menegaskan bahwa media digital memfasilitasi komunikasi dua arah yang lebih dinamis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi politik melalui keterlibatan akar rumput. Hal ini sejalan dengan temuan Merlyna Lim (2017) yang menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi alat mobilisasi politik yang efektif dalam demokrasi digital Indonesia.

Media sosial saat ini merupakan bentuk ekspresi politik karena sifatnya yang dinamis dan adaptif. Platform seperti Instagram, X (Twitter), dan TikTok memiliki kemampuan untuk dengan cepat mengangkat isu-isu yang sebelumnya terpinggirkan di media konvensional menjadi perhatian publik secara luas. Pendekatan ini mencerminkan pemberdayaan warga negara, di mana

---

netizen berfungsi sebagai produsen sekaligus kurator informasi politik. Widiyananda dan Wahyudin (2023) menyatakan bahwa kemampuan media sosial untuk memasuki ranah privat pengguna telah membuat kampanye politik menjadi lebih informal dan persuasif. Selain itu, Jurriëns & Tapsell (2017) menambahkan bahwa struktur kepemilikan dan kekuatan dalam ekosistem digital juga memengaruhi bagaimana informasi politik diproduksi dan didistribusikan kepada publik.

Pembentukan opini publik di era digital sangat dipengaruhi oleh strategi pembingkaihan (*framing*) yang digunakan oleh berbagai aktor politik. Informasi yang disebarluaskan melalui platform digital sering kali dirancang untuk membentuk persepsi publik terhadap individu atau kebijakan tertentu dengan menonjolkan aspek tertentu dan mengabaikan aspek lainnya. Penelitian Kusuma (2022) menunjukkan bahwa narasi yang terstruktur dengan baik di media digital mampu mengubah apati menjadi partisipasi politik aktif, khususnya di kalangan generasi muda. Temuan ini diperkuat oleh Setyawan (2023) yang menyatakan bahwa tingkat literasi digital masyarakat turut menentukan bagaimana individu memahami dan merespons informasi politik, sehingga berpengaruh langsung terhadap kualitas opini publik yang terbentuk.

Selain pembingkaihan, pengaruh algoritma platform digital merupakan elemen penting yang sering tidak disadari oleh pengguna. Algoritma bekerja dengan menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi dan perilaku pengguna sebelumnya, sehingga menciptakan fenomena *echo chamber*. Dalam konteks ini, Rahmawati dan Pradana (2022) menunjukkan bahwa pengguna cenderung hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan mereka, yang pada akhirnya mempersempit perspektif. Victorio et al. (2026) juga menemukan bahwa algoritma media sosial dapat membatasi keberagaman informasi yang diterima publik, sehingga memperkuat pembentukan opini yang homogen dalam kelompok tertentu.

Kondisi tersebut secara bertahap memicu polarisasi politik di ruang digital Indonesia. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi bagian dari dinamika demokrasi justru berkembang menjadi konflik sosial yang tajam. Welan & Kampas (2025) mengungkapkan bahwa polarisasi digital sering diperkuat oleh narasi berbasis identitas yang beredar di media sosial. Hal ini selaras dengan temuan Wahid & Martianto (2026) yang menunjukkan bahwa paparan informasi politik yang berulang dalam lingkungan digital dapat memperkuat sikap politik tertentu dan memperdalam polarisasi di masyarakat.

Opini publik yang terbentuk di media digital pada dasarnya merupakan manifestasi dari aspirasi, kritik, dan evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Opini ini berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* yang penting dalam sistem demokrasi. Kecepatan distribusi informasi memungkinkan respons publik terhadap kebijakan terjadi secara real-time, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas politik. Ardiyanto & Melisa (2025) menegaskan bahwa opini publik digital kini memiliki kekuatan yang sebanding dengan aksi demonstrasi fisik dalam memengaruhi kebijakan. Di sisi lain, Marlina (2025) menunjukkan bahwa media digital juga memperluas partisipasi politik, khususnya di kalangan generasi muda, meskipun tetap diiringi dengan tantangan berupa disinformasi.

Secara keseluruhan, interaksi antara media digital, algoritma, dan pola konsumsi informasi membentuk lanskap opini politik yang kompleks di Indonesia. Media digital tidak hanya membuka ruang partisipasi yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan serius seperti manipulasi informasi dan fragmentasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana media digital memengaruhi kognisi politik individu menjadi sangat penting. Transformasi ini secara fundamental mengubah praktik politik dan membentuk kembali masa depan demokrasi Indonesia dalam era digital (Fatimah, 2025).

---

---

**METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan analisis konten kualitatif untuk melihat isu pembentukan opini publik di media digital. Teknik ini bertujuan membedah makna tersirat, simbol politik, dan nuansa linguistik pada konten digital yang cenderung bersifat ambigu dan terbuka bagi beragam interpretasi. Analisis konten kualitatif memungkinkan untuk mengukur frekuensi kata dan memeriksa keadaan sosial dan politik yang membentuk narasi dalam media digital. Utami (2021) menegaskan bahwa teknik ini relevan untuk menggambarkan pembentukan realitas politik dalam komunikasi digital, karena secara efektif menangkap substansi pesan yang diartikulasikan oleh para pelaku politik dan masyarakat luas.

Penelitian ini mengkaji platform media digital yang secara signifikan memengaruhi wacana publik di Indonesia: portal berita online Kompas.com dan platform media sosial X (sebelumnya Twitter). Pemilihan kedua platform ini didasarkan pada atribut unik namun saling melengkapi: Kompas.com mewakili media arus utama yang sering digunakan sebagai sumber informasi formal, sedangkan platform X menandakan ruang publik digital yang dinamis untuk memantau reaksi langsung dan wacana publik secara real-time. Sumber data penelitian ini meliputi berita, kolom komentar, dan unggahan publik yang berkaitan dengan masalah politik strategis di Indonesia.

Kriteria pemilihan data mencakup pengambilan sampel bertujuan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh sangat relevan dengan tujuan penelitian. Data yang dipilih mencakup unggahan atau artikel yang menunjukkan metrik keterlibatan yang tinggi, termasuk jumlah share, kutipan, dan komentar tertinggi selama jangka waktu tertentu. Pembatasan ini diberlakukan untuk memungkinkan peneliti berkonsentrasi pada konten yang benar-benar memicu wacana publik yang signifikan dan sangat memengaruhi pembentukan opini kolektif. Hal ini sesuai dengan perspektif Hakim dan Rohman (2020), yang menyatakan bahwa konten yang sangat viral merupakan indikator penting dinamika opini publik di ranah digital.

Pendekatan pengumpulan data dilakukan secara metodis dengan menggunakan fungsi pencarian di setiap platform, menggunakan kata kunci dan tagar yang relevan dengan topik politik kontemporer. Investigasi dilakukan secara metodis untuk mengidentifikasi alur cerita penting yang muncul selama periode penelitian. Penggunaan kata kunci yang ditargetkan membantu peneliti dalam menyempurnakan informasi agar tetap fokus pada analisis perkembangan opini politik, sehingga menghindari gangguan dari data yang tidak relevan. Teknik ini menjamin bahwa korpus data yang dikumpulkan memiliki kepadatan informasi yang memadai untuk analisis selanjutnya.

Semua data yang dikumpulkan kemudian dicatat secara digital melalui lembar pengkodean dan tangkapan layar untuk menjaga integritas konteks visualnya. Dokumentasi ini penting karena sifat sementara materi digital, yang dapat dengan mudah diubah atau dihapus oleh pengguna. Dengan memastikan pelestarian digital yang cermat, peneliti membangun basis bukti yang kuat untuk pengambilan selanjutnya selama proses analitis. Ardianto (2019) menegaskan bahwa dokumentasi sistematis dalam penelitian digital sangat penting untuk menjaga integritas data sebelum fase interpretasi.

Fase analisis data dimulai dengan klasifikasi data ke dalam tiga kelompok tergantung pada opini yang berlaku: pro, kontra, dan netral mengenai masalah politik yang diidentifikasi. Setelah menyelesaikan kategorisasi, peneliti melakukan studi komprehensif untuk menyelidiki pola pembingkai dan fungsi nyata algoritma platform dalam memperkuat narasi tertentu. Interpretasi melibatkan korelasi temuan data dengan teori domain publik dan komunikasi politik

---

untuk menjelaskan bagaimana teknologi digital secara teratur memengaruhi persepsi publik. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah opini yang berkembang berasal dari dialog konstruktif atau polarisasi yang dipengaruhi oleh arsitektur platform.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Temuan Data dalam Media Digital**

Pemantauan hasil dari platform digital, termasuk Twitter (X), Instagram, dan portal berita online, mengungkapkan variasi signifikan dalam narasi politik selama periode penelitian. Data dikumpulkan melalui pengamatan postingan publik, komentar, dan berita yang berkaitan dengan masalah politik nasional. Narasi tersebut kemudian dikategorikan menurut topik dan tujuan komunikatifnya. Terdapat tiga kategori utama: narasi dukungan, narasi kritik, dan narasi informasi (Fitriani et al., 2023).

Narasi dukungan kebijakan didefinisikan oleh bahasa persuasif yang umumnya menguntungkan pemerintah atau tokoh politik tertentu. Konten ini sering disertai dengan tagar kampanye dan visual yang memperkuat citra positif. Narasi ini sering ditemukan di akun resmi dan di antara pengikut politik. Distribusinya meningkat secara signifikan, terutama selama pengumuman kebijakan publik (Puspianto, 2021).

Narasi kritik terhadap aktor politik muncul dalam bentuk komentar, opini, dan postingan berdasarkan pengalaman masyarakat. Narasi ini menggunakan bahasa yang sangat emosional dan terkadang sarkastik. Kritik dapat ditujukan pada kebijakan, kinerja, atau integritas tokoh politik. Intensitas narasi kritis meningkat sebagai respons terhadap isu-isu kontroversial (Fathurochman & Tutiasri, 2023).

Narasi netral atau instruktif biasanya berasal dari media berita internet yang menyampaikan informasi faktual. Narasi ini cenderung menggunakan bahasa formal dan seimbang. Tujuan dasar informasi informatif adalah untuk meningkatkan pemahaman publik. Meskipun demikian, terlepas dari sifatnya yang tidak memihak, kerangka tertentu mungkin masih terlihat dalam penyajian berita (Juditha & Darmawan, 2018).

Selain tiga jenis utama ini, narasi yang diungkapkan melalui humor politik dan meme juga sangat umum. Informasi ini umumnya digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang rumit, sehingga membuatnya lebih mudah dipahami. Terlepas dari sifatnya yang tampak sepele, meme menunjukkan tingkat transmisi yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa media digital tidak hanya mentransmisikan informasi tetapi juga memengaruhi persepsi melalui simbol visual

### **Analisis Pola Pembentukan Opini Politik di Media Digital**

Data menunjukkan penggunaan ungkapan seperti "kebijakan ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan bangsa" dalam komunikasi media sosial. Ungkapan-ungkapan ini dilengkapi dengan gambar para pemimpin yang terlibat dalam pekerjaan atau berinteraksi dengan publik. Penggunaan bahasa positif menggambarkan upaya untuk membangun persona kepemimpinan yang kuat. Ini menandakan strategi komunikasi yang menarik untuk membentuk opini publik (Puspianto, 2021).

Tagar seperti #BanggaIndonesia dan #LanjutkanKebaikan umumnya digunakan dalam narasi pendukung. Tagar ini berfungsi sebagai instrumen agregasi dan lambang identitas kolektif. Bukti analitis menunjukkan bahwa penggunaan tagar meningkatkan solidaritas digital di antara para pendukung. Fenomena ini menandakan munculnya komunitas opini di ranah digital (Fitriani et al., 2023). Narasi pendukung sering menggunakan statistik atau fakta untuk validasi. Misalnya, mengutip statistik pertumbuhan ekonomi atau tingkat bantuan sosial. Data ini digunakan untuk memperkuat gagasan yang diartikulasikan. Meskipun demikian, data seringkali kurang konteks

.....

yang memadai, yang dapat mengakibatkan bias (Aridho et al., 2024). Narasi kritis menggunakan istilah seperti "kebijakan ini secara eksklusif menguntungkan kaum elit." Pernyataan ini mencerminkan skeptisisme terhadap pemerintah. Istilah "elit" membawa implikasi negatif yang signifikan. Ini menandakan polarisasi dalam pandangan publik (Fathurochman & Tutiasri, 2023).

Penggunaan ironi terlihat dalam pernyataan seperti "luar biasa, rakyat harus berkorban sekali lagi." Sarkasme digunakan untuk mengekspresikan kritik secara tidak langsung. Ini menandakan mode oposisi terhadap otoritas. Kisah ini sangat emosional dan menyebar dengan cepat di media sosial (Nasrullah, 2019). Narasi kritis juga menggunakan pengalaman manusia untuk membangun validitas. Misalnya, unggahan yang membahas kesulitan ekonomi yang berasal dari undang-undang tertentu. Pengalaman-pengalaman ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa opini publik dibentuk oleh berbagai pengalaman individu secara kolektif (Febriansyah & Muksin, 2020).

Media berita digital menyampaikan informasi dengan menggunakan kerangka jurnalistik konvensional. Contohnya adalah judul berita faktual tanpa komentar eksplisit. Meskipun demikian, pilihan leksikal tertentu terus memengaruhi interpretasi pembaca. Ini menandakan adanya pembingkai bernuansa dalam media (Juditha & Darmawan, 2018). Penggunaan sumber-sumber otoritatif, seperti deklarasi pemerintah, merupakan karakteristik mendasar dari narasi informatif. Sumber-sumber ini meningkatkan kebenaran konten. Keunggulan satu sumber tunggal dapat mengakibatkan bias informasi. Akibatnya, keseimbangan merupakan perhatian utama dalam penyajian berita (Aridho et al., 2024).

Meme politik sering menggunakan foto-foto tokoh terkenal disertai teks satir. Penggabungan grafik dan teks menghasilkan makna baru yang mudah dipahami. Meme berfungsi sebagai media yang efisien untuk mengartikulasikan kritik. Hal ini menggambarkan transformasi dalam metode komunikasi politik di era digital (Nasrullah, 2019). Humor berfungsi untuk meredakan ketegangan dalam percakapan politik. Namun demikian, humor juga dapat melanggengkan prasangka tertentu. Analisis menunjukkan bahwa meme memiliki kapasitas untuk secara tidak langsung membentuk opini. Pesan dikomunikasikan dengan cara yang riang namun berulang (Fitriani et al., 2023).

Peran aktor digital seperti influencer atau tokoh kunci (*key opinion leaders*) menjadi elemen krusial dalam mempercepat penyebaran narasi politik. Data menunjukkan bahwa unggahan dari akun-akun dengan pengikut besar sering kali menjadi titik awal munculnya percakapan publik yang masif. Strategi ini tidak hanya mengandalkan popularitas figur tersebut, tetapi juga teknik pengemasan pesan yang terasa lebih personal dan dekat dengan keseharian audiens dibandingkan saluran berita resmi. Hal ini menciptakan efek kepercayaan instan yang secara signifikan mampu menggiring opini kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan arah narasi yang dibawakan oleh sang aktor (Puspianto, 2021).

Selain faktor aktor, mekanisme algoritma pada berbagai platform media digital berperan besar dalam menciptakan fenomena "ruang gema" (*echo chambers*). Berdasarkan temuan analitis, konten yang mengandung emosi kuat baik itu rasa bangga yang ekstrem maupun kemarahan publik cenderung diprioritaskan oleh algoritma untuk muncul di beranda pengguna. Akibatnya, individu lebih sering terpapar pada opini yang seragam dengan pandangan pribadi mereka, sehingga memperkuat keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Kondisi ini menyulitkan terjadinya dialog antar-kelompok dan justru mempertebal batasan antara narasi pendukung dan narasi kritis di ruang digital (Fitriani et al., 2023).

Sebagai sintesis akhir, pola pembentukan opini politik di Indonesia melalui media digital menunjukkan adanya pergeseran dari debat berbasis kebijakan menuju pertarungan simbol dan identitas. Meskipun terdapat upaya penyampaian data faktual dan narasi informatif, kekuatan

---

visual seperti *meme* dan narasi emosional sering kali lebih efektif dalam memengaruhi persepsi publik. Transformasi ini menandakan bahwa opini publik digital saat ini tidak hanya dibentuk oleh substansi informasi, tetapi juga oleh bagaimana informasi tersebut dibingkai secara linguistik dan didistribusikan secara strategis melalui ekosistem digital yang kompleks (Nasrullah, 2019; (Aridho et al., 2024).

### **Sintesis Teoretis: Media Digital dan Dinamika Opini Publik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital secara signifikan memengaruhi pembentukan opini publik. Fenomena ini selaras dengan teori Agenda Setting yang menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan topik-topik yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam ekosistem digital, media tidak hanya berperan sebagai penyebar informasi, tetapi juga secara aktif mengarahkan fokus perhatian publik. Akibatnya, opini publik cenderung terbentuk melalui paparan informasi yang intens dan berulang (Aridho et al., 2024).

Narasi yang bersifat mendukung menggambarkan upaya strategis untuk membingkai program pemerintah secara positif. Hal ini sejalan dengan teori Framing yang menjelaskan bagaimana media mengonstruksi realitas sosial melalui pemilihan diksi, penggunaan gambar, dan simbol tertentu. Melalui proses pemingkaiannya tersebut, masyarakat sering kali menerima realitas yang telah dikonstruksi oleh media sebagai sebuah kebenaran umum (Puspianto, 2021). Di sisi lain, munculnya narasi kritis menunjukkan adanya ruang publik digital yang sangat aksesibel, sesuai dengan konsep Public Sphere yang menekankan pentingnya wacana publik dalam demokrasi. Media sosial memungkinkan individu mengartikulasikan pemikiran mereka tanpa batasan struktural, meskipun kebebasan ini juga berpotensi memicu konflik dan polarisasi (Fathurochman & Tutiasri, 2023).

Kondisi tersebut diperburuk oleh efek gelembung filter (*filter bubble*) yang memperuncing polarisasi opini di ruang siber. Algoritma media sosial mengkurasi konten berdasarkan preferensi pengguna, sehingga individu cenderung terpapar pada informasi yang seragam dan searah. Dampaknya, sudut pandang pribadi menjadi semakin kaku karena minimnya perspektif alternatif yang menyeimbangkan (Rahman, Mitrin, Azizah, Amelia, & Amalia, 2025). Fenomena ini juga terlihat dalam penggunaan *meme* politik yang menandai evolusi substansial dalam komunikasi politik. Pesan politik kini disampaikan secara kurang formal, fleksibel, dan inovatif agar lebih mudah viral. Hal ini tidak hanya memperluas jangkauan komunikasi politik, tetapi juga secara fundamental mengubah cara publik memahami isu-isu kenegaraan (Fitriani et al., 2023).

Keterlibatan publik yang masif dalam kanal digital mencerminkan tren demokratisasi informasi, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk bersuara secara bebas. Namun, tantangan muncul karena tidak semua informasi yang beredar memiliki kualitas dan akurasi yang setara. Oleh karena itu, literasi digital menjadi elemen krusial dalam membentuk opini publik yang terinformasi dan kritis (Febriansyah & Muksin, 2020). Pada akhirnya, media digital berfungsi sebagai platform percakapan di mana aktor politik dan masyarakat saling memengaruhi secara dinamis. Realitas politik kini diproduksi melalui kontak digital yang terus-menerus, menunjukkan bahwa opini publik bersifat cair dan senantiasa bertransformasi (Aridho et al., 2024).

Ketajaman analisis terhadap pola-pola di atas menunjukkan bahwa pembentukan opini publik di media digital Indonesia bukan lagi sekadar proses pertukaran pesan yang linier, melainkan hasil dari pertarungan narasi yang kompleks. Dominasi bahasa visual dan penggunaan diksi emosional sering kali melampaui bobot argumen berbasis data faktual. Dalam konteks ini, kecepatan penyebaran informasi (*virality*) menjadi mata uang baru yang menentukan sejauh mana sebuah opini dapat diterima oleh khalayak luas, tanpa mempedulikan kedalaman substansi pesannya (Puspianto, 2021).

---

Integrasi antara algoritma platform dan psikologi massa menciptakan tantangan baru bagi stabilitas demokrasi digital. Ketika opini publik dibentuk dalam "ruang gema" yang tertutup, kemampuan masyarakat untuk melakukan deliberasi secara sehat menjadi terhambat. Penelitian ini membuktikan bahwa polarisasi bukan hanya terjadi karena perbedaan pandangan politik, melainkan juga akibat desain teknologi yang secara tidak langsung mengisolasi pengguna dari fakta-fakta yang berseberangan dengan keyakinan mereka (Nasrullah, 2019).

Lebih lanjut, peran aktor-aktor non-organik seperti akun-akun anonim dan perangkat otomatis dalam menyebarkan konten satir atau meme telah menggeser batas antara kritik sosial yang sehat dan agitasi politik. Meskipun humor dan satir dapat meredakan ketegangan, penggunaan yang tidak terkontrol justru dapat melanggengkan prasangka dan stigma terhadap kelompok tertentu. Hal ini menegaskan bahwa media digital memiliki sisi ganda: sebagai alat pembebasan suara warga sekaligus sebagai instrumen manipulasi persepsi yang sangat efektif (Fitriani et al., 2023).

Terkait dengan fungsi informatif media berita digital, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya independensi leksikal dalam penulisan berita. Meskipun jurnalisme berupaya menjaga faktualitas, pemilihan kata-kata tertentu yang memiliki muatan politis tetap mampu mengarahkan pembaca pada interpretasi yang bias. Keseimbangan dalam penyajian informasi menjadi mutlak diperlukan guna memastikan bahwa media digital tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi yang menyediakan informasi objektif bagi masyarakat (Aridho et al., 2024; Juditha & Darmawan, 2018).

Sebagai simpulan dari seluruh rangkaian analisis, pembentukan opini politik di Indonesia saat ini berada pada persimpangan antara keterbukaan informasi dan fragmentasi sosial. Kunci utama untuk menghadapi dinamika ini terletak pada penguatan kapasitas berpikir kritis pengguna media digital. Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat akan terus menjadi objek dari strategi pembingkaihan realitas yang dilakukan oleh berbagai kepentingan politik. Dengan demikian, penguatan ekosistem digital yang sehat harus melibatkan kolaborasi antara regulasi platform, integritas aktor politik, dan kesadaran kritis dari publik itu sendiri (Febriansyah & Muksin, 2020).

## **KESIMPULAN**

Studi ini mendeskripsikan dampak signifikan media digital terhadap pembentukan opini politik publik di Indonesia. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen aktif dalam konstruksi dan distribusi narasi politik melalui media sosial dan platform berita online. Temuan penelitian mengidentifikasi tiga jenis narasi utama, yaitu suportif, kritis, dan instruktif, yang masing-masing memiliki karakter bahasa dan tujuan komunikatif yang berbeda. Selain itu, berkembangnya humor dan parodi politik menunjukkan adanya adaptasi komunikasi politik terhadap budaya digital yang semakin dinamis.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi Teori Agenda Setting, Framing, dan konsep ruang publik dari Jürgen Habermas dalam konteks digital. Media digital memiliki kemampuan dalam membentuk persepsi publik melalui konstruksi realitas politik berbasis bahasa dan simbol. Namun, publik tidak sepenuhnya pasif, melainkan mampu merespons dan mengkritisi melalui berbagai representasi digital. Interaksi ini menunjukkan adanya hubungan dinamis antara media, aktor politik, dan masyarakat dalam memengaruhi opini publik.

Di sisi lain, fenomena filter bubble akibat algoritma media digital berkontribusi pada meningkatnya polarisasi opini di masyarakat. Paparan informasi yang homogen mendorong terbentuknya echo chamber yang memperkuat keyakinan tanpa mempertimbangkan perspektif lain, sehingga berpotensi melemahkan kualitas diskursus demokrasi. Oleh karena itu, media

---

digital memiliki peran ganda, yaitu sebagai sarana pemberdayaan sekaligus pemicu fragmentasi sosial. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi faktor kunci untuk menjaga kualitas opini publik dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

### **Rekomendasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dan aktor politik perlu meningkatkan inisiatif literasi digital yang tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada pemahaman kritis terhadap informasi politik. Edukasi terkait identifikasi disinformasi, bias media, serta cara kerja algoritma menjadi penting untuk membentuk masyarakat yang lebih cerdas dalam mengonsumsi informasi. Di sisi lain, regulasi perlu terus berkembang mengikuti dinamika teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan platform digital menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem informasi yang sehat dan akuntabel, termasuk melalui peningkatan transparansi algoritma serta pengendalian konten untuk menekan disinformasi dan ujaran kebencian.

Selain itu, masyarakat sebagai pengguna media digital diharapkan lebih selektif dan kritis dalam mengonsumsi serta menyebarkan informasi politik, dengan mengedepankan dialog yang konstruktif dan berbasis fakta. Media digital dengan demikian dapat berfungsi sebagai sarana penguatan demokrasi, bukan justru memperdalam fragmentasi sosial. Untuk pengembangan ke depan, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti metode kuantitatif atau campuran, serta memperluas fokus pada platform atau komunitas tertentu. Kajian mengenai pengaruh teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan big data juga menjadi penting guna memperkaya pemahaman tentang dinamika opini publik dalam era komunikasi politik digital.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Achmad, F., & Dwimawanti, I. H. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik generasi Z dalam pemilu 2024 di Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 975–990.
- Aidah, S., Amalia, A. R., & Aqida, A. (2026). Media Massa dan Pembentukan Pandangan Politik di Era Digital. *Indonesian Character Journal*, 3(1), 33–44.
- Al Fatih, I. Z., Putera, R. A., & Umar, Z. H. (2024). Peran algoritma media sosial dalam penyebaran propaganda politik digital menjelang pemilu. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 7(1), 6.
- Ardiyanto, E., & Melisa, R. S. (2025). Analisis Strategi Komunikasi Politik Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap 2025. *Jurnal Heritage*, 13(1), 1–16.
- Aridho, A., Situmeang, T. A., Tinambunan, D. R., Ramadhani, K. N., Lase, M. W., & Ivanna, J. (2024). Peran media massa dalam membentuk opini publik: Demokratisasi pasca-reformasi. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 206–210.
- Fathurochman, N. Y., & Tutiasri, R. P. (2023). Penerimaan Generasi Z terhadap polarisasi politik. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6837–6845.
- Fatimah, S. (2025). Transformasi ruang publik digital: tantangan sosial dan konstitusional dalam demokrasi era media baru. *Cakrawala*, 19(1), 67–86.
-

- Febriansyah, F., & Muksin, N. N. (2020). Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa. *Sebatik*, 24(2), 193–200.
- Fitriani, D., Budiyan, Y., Hardika, A. R., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia: analisis peran teknologi dan media sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 362–371.
- Juditha, C., & Darmawan, J. (2018). Penggunaan media digital dan partisipasi politik generasi milenial use of digital media and political participation milenial generation. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik Vol*, 22(2), 94–109.
- Jurriëns, E., & Tapsell, R. (2017). *Digital Indonesia: connectivity and divergence*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427.
- Marlina, S. (2025). Dinamika Partisipasi Politik Generasi Milenial di Era Digital: Studi Kasus Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 13–18.
- Maulana, I. (2017). Social media as public political instrument. In *Handbook of research on citizen engagement and public participation in the era of new media* (pp. 231–247). IGI Global Scientific Publishing.
- Munfida, N. S., Soetijono, I. R., & Indrayati, R. (2023). Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(2), 161–181.
- Puspianto, A. (2021). Media Massa dan Pembentukan Opini Publik. *An-Nida': Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 10(1), 95–118.
- Rahman, R., Mitrin, A., Azizah, P., Amelia, V., & Amalia, R. (2025). Pengaruh algoritma media sosial terhadap pola konsumsi informasi di kalangan gen z di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 13(2), 351–358.
- Setyawan, H. (2023). Penguatan Literasi Digital Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Menjelang Pemilu Tahun 2024 Dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Kertas Karya Ilmiah Perseorangan, Jakarta (Id): Lemhanas*.
- Victorio, W., Tumanggor, R. O., Maharani, B., Pasya, N. I., Angel, G., & Pangestu, Y. (2026). Penerapan Nilai Kerakyatan Pancasila dalam Menangkal Polarisasi Opini di Media Sosial. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 581–586.
- Wahid, U., & Martianto, R. W. U. (2026). *Polarisasi, Algoritma TikTok, dan Kesehatan Mental Politik*. Indigo Media.
- Welan, A. E., & Kampas, E. (2025). Tantangan Ideologi Pancasila Di Era Media Sosial: Analisis Pengaruh Polarisasi Digital terhadap Persatuan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 3(2), 146–157.
- Zhuravskaya, E., Petrova, M., & Enikolopov, R. (2020). Political effects of the internet and social media. *Annual Review of Economics*, 12(1), 415–438.
-